

[illegible]

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Tersedianya kebijakan internal yang mendukung terwujudnya tata kelola kerumahtangaan DPR				41.036.132,0				0,0	0,0	0,0
01.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		Rekomendasi Kebijakan		41.036.132,0				0,0	0,0	0,0
01.ABL.001	Kebijakan Kerumahtanggaan DPR RI	21	Rekomendasi Kebijakan		41.036.132,0	15	15	15	0,0	0,0	0,0
02	Penegakan Kode Etik DPR melalui pelaksanaan penanganan perkara etik yang berkualitas				25.114.000,0				0,0	0,0	0,0
02.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		Perkara/ Berkas Perkara		25.114.000,0				0,0	0,0	0,0
02.BCA.001	Tata Beracara dan Kode Etik MKD	36	Perkara		25.114.000,0	20	20	20	0,0	0,0	0,0
Total					66.150.132,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

5801 - Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI
UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
01 - Biro Persidangan I 02 - Biro Persidangan II
07 - Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
08 - Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Rasionalisasi Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang aspiratif		21.252.905,0
01.01	Ditetapkanannya Daftar Prolegnas	1	
02	Tersedianya Daftar RUU Prioritas yang Memenuhi Kebutuhan Hukum Nasional		10.381.795,0
02.01	Ditetapkanannya Daftar RUU Prioritas	1	
03	Terbentuknya UU Usul Inisiatif DPR dan Usul Pemerintah yang Mendukung Prioritas Pembangunan dan Menguatkan Demokrasi Indonesia		676.988.021,0
03.01	Terbentuknya UU	28	
04	Terlaksananya penyebaran UU pada publik		85.129.262,0
04.01	Jumlah kegiatan penyebaran UU yang dilaksanakan Anggota DPR RI	1160	
05	Terlaksananya pendampingan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi		3.866.432,0
05.01	Jumlah pendampingan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi	55	
06	Terlaksananya penanganan perkara hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI		1.083.819,0
06.01	Jumlah penanganan perkara hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI	3	
Total			798.702.234,0

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

03.AAA.004	Undang-undang Usul Pemerintah oleh Baleg dan Pansus									57.649.956,0
03.AAA.005	RUU Kumulatif Terbuka									17.068.513,0
04	<i>Terlaksananya penyebarluasan UU pada publik</i>									85.129.262,0
04.AEA	Koordinasi									85.129.262,0
04.AEA.001	Penyebarluasan Undang-Undang oleh Anggota DPR RI									85.129.262,0
05	<i>Terlaksananya pendampingan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi</i>									3.866.432,0
05.BCB	Perkara Hukum Lembaga									3.866.432,0
05.BCB.001	Perkara di Mahkamah Konsititusi									3.866.432,0
06	<i>Terlaksananya penanganan perkara hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI</i>									1.083.819,0
06.BCB	Perkara Hukum Lembaga									1.083.819,0
06.BCB.002	Perkara Hukum Baik di Dalam Maupun di Luar Pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI									1.083.819,0
Total										798.702.234,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Rasionalisasi Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang aspiratif				21.252.905,0				0,0	0,0	0,0
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik			Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	7.763.127,0				0,0	0,0	0,0
01.ABC.001	Program Legislasi Nasional	3		Rekomendasi Kebijakan	7.763.127,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
01.BKB	Pemantauan produk			laporan	13.489.778,0				0,0	0,0	0,0
01.BKB.001	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pemantauan Tugas Baleg Lainnya	8		laporan	13.489.778,0	9	9	9	0,0	0,0	0,0
02	Tersedianya Daftar RUU Prioritas yang Memenuhi Kebutuhan Hukum Nasional				10.381.795,0				0,0	0,0	0,0
02.AAH	Peraturan lainnya			peraturan/ Rancangan Peraturan/ Surat Keputusan	10.381.795,0				0,0	0,0	0,0
02.AAH.001	Peraturan DPR	1		peraturan	10.381.795,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
03.AAA	Undang-Undang			UU/ RUU	676.988.021,0				0,0	0,0	0,0
03.AAA.001	Undang-undang Usul DPR oleh Komisi	13		RUU	274.468.405,0	12	12	12	0,0	0,0	0,0
03.AAA.002	Undang-Undang Usul DPR oleh Baleg, Pansus dan Perorangan Anggota	6		RUU	75.143.752,0	31	31	31	0,0	0,0	0,0
03.AAA.003	Undang-Undang Usul Pemerintah oleh Komisi	13		RUU	252.657.395,0	11	11	11	0,0	0,0	0,0
03.AAA.004	Undang-undang Usul Pemerintah oleh Baleg dan Pansus	3		RUU	57.649.956,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
03.AAA.005	RUU Kumulatif Terbuka	16		RUU	17.068.513,0	16	16	16	0,0	0,0	0,0
04	Terlaksananya penyebarluasan UU pada publik				85.129.262,0				0,0	0,0	0,0
04.AEA	Koordinasi			kegiatan	85.129.262,0				0,0	0,0	0,0

04.AEA.001	Penyebarluasan Undang-Undang oleh Anggota DPR RI	1160	kegiatan		85.129.262,0	1160	1160	1160	0,0	0,0	0,0
05	Terlaksananya pendampingan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi				3.866.432,0				0,0	0,0	0,0
05.BCB	Perkara Hukum Lembaga		Perkara/ Berkas Perkara		3.866.432,0				0,0	0,0	0,0
05.BCB.001	Perkara di Mahkamah Konsititusi	55	Perkara		3.866.432,0	55	55	55	0,0	0,0	0,0
06	Terlaksananya penanganan perkara hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI				1.083.819,0				0,0	0,0	0,0
06.BCB	Perkara Hukum Lembaga		Perkara/ Berkas Perkara		1.083.819,0				0,0	0,0	0,0
06.BCB.002	Perkara Hukum Baik di Dalam Maupun di Luar Pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI	3	Perkara		1.083.819,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
Total					798.702.234,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

[illegible]

5802 - Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI
UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
01 - Biro Persidangan I 02 - Biro Persidangan II

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tersedianya APBN bagi penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola		51.138.247,0
01.01	Terbentuknya UU APBN	1	
01.02	Terlaksananya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang akuntabel	1	
01.03	Tersedianya rekomendasi kebijakan pembahasan APBN dan anggaran mitra kerja DPR RI	44	
Total			51.138.247,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Tersedianya APBN bagi penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola				51.138.247,0				0,0	0,0	0,0
01.AAA	Undang-Undang		UU/ RUU		9.204.230,0				0,0	0,0	0,0
01.AAA.001	RUU RAPBN	1	RUU		3.423.779,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AAA.002	RUU APBN-P	1	RUU		3.397.529,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AAA.003	RUU Pertanggungjawaban APBN	1	RUU		2.382.922,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		41.934.017,0				0,0	0,0	0,0
01.ABA.001	Kebijakan Pembahasan APBN	12	Rekomendasi Kebijakan		30.580.678,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.ABA.002	Kebijakan Anggaran Mitra Kerja DPR oleh Komisi	55	Rekomendasi Kebijakan		11.353.339,0	44	44	44	0,0	0,0	0,0
Total					51.138.247,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

[illegible]

[illegible]

03 - Biro Kesekretariatan Pimpinan 05 - Biro Keuangan

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terselenggaranya Fungsi Pengawasan DPR terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah yang berkualitas</i>										625.551.720,0
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik										625.551.720,0
01.ABC.001	Kebijakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Komisi										302.071.177,0
01.ABC.002	Kebijakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Pimpinan DPR RI										96.186.070,0
01.ABC.003	Kebijakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Panitia Khusus Non RUU										1.547.361,0
01.ABC.005	Kebijakan Penanganan Kasus-Kasus Spesifik oleh Komisi										124.127.743,0
01.ABC.006	Kebijakan Penanganan Kasus Spesifik Perorangan Anggota/Inspeksi Mendadak										101.619.369,0
02	<i>Rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK</i>										35.702.850,0
02.ABC	Kebijakan Bidang Politik										35.702.850,0
02.ABC.007	Kebijakan Pelaksanaan Tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara										35.702.850,0
03	<i>Terlaksananya pengisian jabatan publik</i>										4.767.332,0
03.ABC	Kebijakan Bidang Politik										4.767.332,0
03.ABC.004	Kebijakan Fit and Proper Test										4.767.332,0
Total											666.021.902,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terselenggaranya Fungsi Pengawasan DPR terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah yang berkualitas				625.551.720,0				0,0	0,0	0,0
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		625.551.720,0				0,0	0,0	0,0
01.ABC.001	Kebijakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Komisi	24	Rekomendasi Kebijakan		302.071.177,0	11	11		0,0	0,0	0,0
01.ABC.002	Kebijakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Pimpinan DPR RI	16	Rekomendasi Kebijakan		96.186.070,0	8	8	8	0,0	0,0	0,0
01.ABC.003	Kebijakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Panitia Khusus Non RUU	1	Rekomendasi Kebijakan		1.547.361,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.ABC.005	Kebijakan Penanganan Kasus-Kasus Spesifik oleh Komisi	48	Rekomendasi Kebijakan		124.127.743,0	11	11		0,0	0,0	0,0
01.ABC.006	Kebijakan Penanganan Kasus Spesifik Perorangan Anggota/Inspeksi Mendadak	3	Rekomendasi Kebijakan		101.619.369,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02	Rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK				35.702.850,0				0,0	0,0	0,0
02.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		35.702.850,0				0,0	0,0	0,0
02.ABC.007	Kebijakan Pelaksanaan Tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	25	Rekomendasi Kebijakan		35.702.850,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
03	Terlaksananya pengisian jabatan publik				4.767.332,0				0,0	0,0	0,0
03.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		4.767.332,0				0,0	0,0	0,0
03.ABC.004	Kebijakan Fit and Proper Test	7	Rekomendasi Kebijakan		4.767.332,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
Total					666.021.902,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

5804 - Pengelolaan Kelembagaan oleh Pimpinan DPR
UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
03 - Biro Kesekretariatan Pimpinan

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Tersedianya kebijakan internal yang mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan DPR		262.327.956,0
01.01	Tersedianya Keputusan Pimpinan DPR RI	25	
Total			262.327.956,0

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Tersedianya kebijakan internal yang mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan DPR</i>										262.327.956,0
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik										262.327.956,0
01.ABC.001	Keputusan Pimpinan DPR RI										262.327.956,0
Total											262.327.956,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Tersedianya kebijakan internal yang mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan DPR				262.327.956,0				0,0	0,0	0,0
01.ABC	Kebijakan Bidang Politik		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		262.327.956,0				0,0	0,0	0,0
01.ABC.001	Keputusan Pimpinan DPR RI	132	Rekomendasi Kebijakan		262.327.956,0	36	36	36	0,0	0,0	0,0
Total					262.327.956,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

[illegible]

5805 - Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional
UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
04 - Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terlaksananya Peran Diplomasi DPR RI secara efektif dalam berbagai forum internasional/regional/bilateral		448.688.182,0
01.01	Jumlah keikutsertaan DPR dalam berbagai forum internasional/regional/bilateral	10	
02	Terselenggaranya konferensi atau kegiatan parlemen internasional		68.182.333,0
02.01	Jumlah kegiatan DPR sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi atau kegiatan parlemen internasional lainnya	2	
Total			516.870.515,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025									PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)								
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)										
						2026	2027	2028	2026	2027	2028								
01	Terlaksananya Peran Diplomasi DPR RI secara efektif dalam berbagai forum internasional/regional/bilateral				448.688.182,0				0,0	0,0	0,0								
01.AEC	Kerja sama		Kesepakatan/ Dokumen/ Kegiatan		448.688.182,0				0,0	0,0	0,0								
01.AEC.001	Diplomasi Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	860	Kegiatan		448.688.182,0	176	176	176	0,0	0,0	0,0								
02	Terselenggaranya konferensi atau kegiatan parlemen internasional				68.182.333,0				0,0	0,0	0,0								
02.AEG	Konferensi dan Event		Kegiatan/ Paket Kegiatan		68.182.333,0				0,0	0,0	0,0								
02.AEG.001	Sidang/Konferensi di Dalam Negeri	5	Kegiatan		68.182.333,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0								
Total					516.870.515,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0								

[illegible]

KEGIATAN
5806 - Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat
UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
02 - Biro Persidangan II 05 - Biro Keuangan

SASARAN KEGIATAN			
KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan Anggota DPR RI		3.640.794.535,0
01.01	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di daerah pemilihan	8120	
02	Terlaksananya Kegiatan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI yang menunjang pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.		87.000.000,0
02.01	Jumlah Kegiatan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI di daerah pemilihan.	580	
Total			3.727.794.535,0

RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terlaksananya Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan Anggota DPR RI</i>										3.640.794.535,0
01.BMB	Komunikasi Publik										3.640.794.535,0
01.BMB.001	Kunjungan Kerja Diluar Masa Reses dan Diluar Sidang DPR (8 Kali Setahun)										1.127.543.702,0
01.BMB.002	Kunjungan Kerja pada Masa Reses (5 Kali Dalam Setahun)										2.245.280.135,0
01.BMB.003	Kunjungan Kerja pada Masa Reses atau pada Masa Sidang (1 Kali Satu Tahun)										243.797.168,0
01.BMB.005	PELAKSANAAN TUGAS BADAN ASPIRASI MASYARAKAT										24.173.530,0
02	<i>Terlaksananya Kegiatan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI yang menunjang pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.</i>										87.000.000,0
02.BMB	Komunikasi Publik										87.000.000,0
02.BMB.004	Rumah Aspirasi Anggota DPR										87.000.000,0
Total											3.727.794.535,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MA JU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan Anggota DPR RI				3.640.794.535,0				0,0	0,0	0,0
01.BMB	Komunikasi Publik		layanan/ kegiatan/ Media/ Orang/ Volume		3.640.794.535,0				0,0	0,0	0,0
01.BMB.001	Kunjungan Kerja Diluar Masa Reses dan Diluar Sidang DPR (8 Kali Setahun)	4640	kegiatan		1.127.543.702,0	4640	4640	4640	0,0	0,0	0,0
01.BMB.002	Kunjungan Kerja pada Masa Reses (5 Kali Dalam Setahun)	2900	kegiatan		2.245.280.135,0	2900	2900	2900	0,0	0,0	0,0
01.BMB.003	Kunjungan Kerja pada Masa Reses atau pada Masa Sidang (1 Kali Satu Tahun)	580	kegiatan		243.797.168,0	580	580	580	0,0	0,0	0,0
01.BMB.005	PELAKSANAAN TUGAS BADAN ASPIRASI MASYARAKAT	1	layanan		24.173.530,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02	Terlaksananya Kegiatan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI yang menunjang pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.				87.000.000,0				0,0	0,0	0,0

02.BMB	Komunikasi Publik		layan/ kegiatan/ Media/ Orang/ Volume		87.000.000,0				0,0	0,0	0,0
02.BMB.004	Rumah Aspirasi Anggota DPR	1036	kegiatan		87.000.000,0	580	580	580	0,0	0,0	0,0
Total					3.727.794.535,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

SASARAN KEGIATAN		
KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025 ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPR RI	1.818.049.734,0
01.01	Gaji dan tunjangan Anggota DPR RI	2
Total		1.818.049.734,0

RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPR RI										1.818.049.734,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										1.818.049.734,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran										1.818.049.734,0
Total											1.818.049.734,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)					
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)	
						2026	2027	2028	2026	2027
01	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPR RI				1.818.049.734,0				0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		1.818.049.734,0				0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	2	Layanan		1.818.049.734,0	2	2	2	0,0	0,0
Total					1.818.049.734,0	-	-	-	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Anggota DPR RI		1.818.049.734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.818.049.734,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.818.049.734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.818.049.734,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		1.818.049.734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.818.049.734,0
Total			1.818.049.734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.818.049.734,0

Jakarta, 7 Januari 2025
Sekretaris Jenderal DPR RI

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si. M.I.Kom.